

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Chritianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Dee, M. L. (2024). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Edrisky, I. F. (2019). *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Haryadi, D. (2012). *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyber Porn Di Indonesia*. Pangkalpinang: Lima.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA.
- Lamintang, F. T., & Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., & Samosir, D. (2019). *Delik-delik Khusus. Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Maria, dkk. (2022). *Perilaku dan Budaya Organisasi*. NTB: Seval Literindo Kreasi.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nitibaskara, R. (2018). *Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian*. Tangerang Selatan: UMJ Press.
- Nugroho, S. S., dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Octarina, N. F. (2018). *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang: Setara Press.
- Prima Pena Tim. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Surabaya: Gita Media Press.
- Rinaldi, K., & Setiawan, R. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Simatupang, N., & Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Siregar, A. (2019). *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Situmorang, S.H., & Lutfi, M. (2014). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Wijoyo, H., dkk. (2024). *Cyber Crime*. Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Yitawati, K., dkk. (2017). *Hukum dan Teknologi*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Artikel dalam Jurnal**
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum. *Jurnal Legalitas*, Volume 12, Nomor 1, (hlm 27-37).
- Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika*, Volume 24, Nomor 2 (hlm. 76).
- Arif, M. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum Al Adl*. Volume 13, Nomor 1, (hlm 91-101).
- Hartono, S., & Yuliantini, R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6, Nomor 1 (hlm. 283).
- Jayadi, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi. *Jurnal El-Iqtishady*, Volume 2, Nomor 1, (hlm. 130).
- Moningka, R. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Bermuatan Asusila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 6, (hlm 103).

- Mutiara, D. (2019). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) “Odah Etam” Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7 Nomor 4, (hlm. 1783).
- Oktarisa, R. D., dkk. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Dinamika*, Volume 28, Nomor 3, (hlm 3520).
- Pamungkas, E. F. (2021). Analisis Kriminologis Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Perkara Nomor:128/Pid.Sus/2020/Pn Kbu). *Jurnal Petitum*, Volume 1, Nomor 2, (hlm 116).
- Prawoko, A., dkk. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 4, (hlm 210).
- Purba, G. E., dkk. (2024). Budaya Salam Sapa Sebagai Manifestasi Sila Ketiga Pancasila (Studi Pada Interaksi Sosial Di Fakultas Ilmu Sosial Unimed). *Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, Volume 2, Nomor 3, (hlm 304).
- Refalia, S., & Prasetyo, B. (2024). Pembuktian Akun Palsu Terhadap Selebgram Yang Diduga Melakukan Promosi Judi Online Proving Fake Accounts Against Celebgrams Suspected Of Promoting Online Gambling. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5, Nomor, 7 (hlm. 5).
- Riduan, A. (2018). Aspek-Aspek Berkaitan Implementasi Kebijakan Anti Perbuatan Asusila Di Sejumlah Warung Malam Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, (hlm 13).
- Saputra, M. A. D. (2022). *Cyber Troop* (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia *Cyber* (Studi Kasus di Polda Bali). *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, Nomor 1, (hlm. 92).
- Sembiring, R. G., dkk. (2023). Penegakan Hukum *Cybercrime* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 3, (hlm. 296).

- Setiyawan, W. B. M., dkk. (2020). Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam menghadapi Serangan Siber Guna Menjagakedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Volume 3, Nomor 2, (hlm. 281).
- Sulolipu, A. I. D. (2019). Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat. *Jurnal Al-Ishlah*, Volume 21, Nomor 1, (hlm 49-50).
- Syaiful, M., Azriadi. (2022). Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, (hlm. 148).
- Syari, A. A. (2014). Statistika Pendidikan. *Jurnal Sigma*. Volume 6, Nomor 2, (hlm 121-129).
- Walansendouw, S. E. (2024). Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pasal 369 Ayat (1) Kuhp (Kajian Terhadap Putusan Ma No. 52 K/Pid/2022). *Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 2, (hlm 3-7).
- Wardana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Volume 14, Nomor 2, (hlm 80-88).
- Zaini, Z. D., dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto/Video Asusila Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, Volume 5, Nomor 1, (hlm 1112).

### **Skripsi**

- Fitrianti, R. (2023). Peran Tim Siber Polri Dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Seksual Anak Melalui Facebook Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqasid Syari'Ah (Studi Kasus Pada Polresta Surakarta). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
- Haryanti, M. W. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Dengan Konten Pornografi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Batang Hari. *Skripsi*. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.
- Rizki, R. P. (2020). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakpidana *Cyberporn* (Studi Kasus di Polres Mataram). *Skripsi*. Mataram: Universitas Mataram.

Saputra, R. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar Di Media Sosial Disertai Dengan Pemesaran Dan Pengancaman (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh). *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raninry Banda Aceh.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6341).